



Dari Bantuan Sosial Menuju Pemberdayaan: Model Intervensi Sosial Terpadu dalam Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran

**Wahyu Rizky Parmanda¹, Hilda Syahrani²,
Ikhwan Kurnia Hutasuhut³**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: wahyurizkyparmanda@uinsu.ac.id¹, hildasyahrani@uinsu.ac.id²,
ikhwankurniahutasuhut@uinsu.ac.id³

Abstract

Poverty and unemployment are interrelated social problems that affect the economic, social, and psychological well-being of communities. This study aims to analyze the dynamics of poverty and unemployment and to formulate an integrated social intervention model that links social protection with community empowerment. The study employs a qualitative approach using Secondary Qualitative Data Analysis (SQDA) on three case studies in the city of Medan and Deli Serdang Regency. Data were analyzed using open coding, thematic analysis, and cross-case analysis. The results indicate that poverty is influenced by income instability, informal employment, and the burden of family dependents, while unemployment is influenced by limited job opportunities, skill mismatches, lack of work experience, and age-related barriers. The Keluarga Harapan Program helps meet families' basic needs but has not yet fully fostered economic self-reliance. This study developed an Integrated Social Intervention Model that includes basic protection, capacity building, job placement, economic empowerment, and psychosocial support as strategies for sustainable poverty and unemployment alleviation

Keywords: *Poverty; unemployment; social assistance; community empowerment; integrated social intervention*

Abstrak

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah sosial yang saling berkaitan dan memengaruhi kesejahteraan ekonomi, sosial, serta psikologis masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kemiskinan dan pengangguran serta merumuskan model intervensi sosial terpadu yang menghubungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui Secondary Qualitative Data Analysis (SQDA) terhadap tiga studi kasus di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Data dianalisis menggunakan open coding, analisis tematik, dan cross-case analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh ketidakstabilan pendapatan, pekerjaan informal, dan beban tanggungan keluarga, sedangkan pengangguran dipengaruhi oleh keterbatasan kesempatan kerja, ketidaksesuaian keterampilan, minimnya pengalaman kerja, dan hambatan usia. Program Keluarga Harapan membantu pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, tetapi belum sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi. Penelitian ini menghasilkan Model Intervensi Sosial Terpadu yang mencakup perlindungan dasar, peningkatan kapasitas, penghubung kerja, pemberdayaan ekonomi, dan dukungan psikososial sebagai strategi penanganan kemiskinan dan pengangguran yang berkelanjutan

Kata Kunci: *Kemiskinan; pengangguran; bantuan sosial; pemberdayaan masyarakat; intervensi sosial terpadu*

A. Pendahuluan

Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua persoalan sosial yang saling berkaitan dan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kedua masalah tersebut tidak hanya berdampak pada rendahnya pendapatan rumah tangga, tetapi juga memengaruhi akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pengangguran mengurangi kemampuan individu memperoleh pendapatan, sedangkan kemiskinan membatasi akses terhadap pendidikan, pelatihan, modal usaha, dan peluang ekonomi sehingga membentuk lingkaran kerentanan (*vicious cycle of poverty*) yang sulit diputus tanpa



intervensi yang komprehensif^{1,2}. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui pertumbuhan ekonomi semata, tetapi memerlukan kebijakan yang mampu memperkuat kapasitas individu dan komunitas agar dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Permasalahan tersebut masih menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen dari total penduduk, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,76 persen^{3,4}. Meskipun kedua indikator tersebut menunjukkan tren yang membaik dibandingkan periode sebelumnya, jutaan masyarakat masih hidup dalam kondisi rentan akibat ketidakstabilan pendapatan, dominasi pekerjaan di sektor informal, rendahnya produktivitas, dan terbatasnya perlindungan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan dan pengangguran belum sepenuhnya mencerminkan meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan perlu diukur tidak hanya dari penurunan indikator makro, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pekerjaan produktif, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup⁵.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan berbagai program perlindungan sosial, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertujuan mengurangi kerentanan ekonomi melalui bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin. Selain PKH,

¹Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Oxford University Press, 1999), 87–110.

²World Bank, *Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course* (Washington, DC: World Bank, 2022), 15–42.

³Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025)

⁴Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025)

⁵United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock—Reimagining Cooperation in a Polarized World* (New York: United Nations Development Programme, 2024), 33–61.

pemerintah juga melaksanakan berbagai program seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), dan berbagai program pelatihan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program perlindungan sosial mampu meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan konsumsi rumah tangga serta membantu keluarga miskin menghadapi guncangan ekonomi^{6,7}. Namun demikian, efektivitas bantuan sosial dalam membentuk kemandirian ekonomi masih menjadi perdebatan karena sebagian besar penerima manfaat tetap menghadapi keterbatasan keterampilan, akses pekerjaan, literasi keuangan, dan peluang usaha yang berkelanjutan⁸.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan pendapatan. Dalam *Capability Approach*, Sen menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan keterbatasan kemampuan (*capability deprivation*) individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna⁹. Dengan demikian, pembangunan harus diarahkan pada perluasan kemampuan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan partisipasi sosial. Perspektif ini diperkuat oleh pendekatan kemiskinan multidimensi yang dikembangkan oleh Alkire dan Foster¹⁰, yang menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai dimensi, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Oleh karena itu, keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tidak cukup diukur melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui

⁶World Bank, *Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course* (Washington, DC: World Bank, 2022), 15–42

⁷Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Government at a Glance 2023* (Paris: OECD Publishing, 2023), 121–138.

⁸Armando Barrientos, *Social Assistance in Developing Countries*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2023), 96–118.

⁹Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Oxford University Press, 1999), 87–110

¹⁰Sabina Alkire and James Foster, “Counting and Multidimensional Poverty Measurement,” *Journal of Public Economics* 95, nos. 7–8 (2011): 476–487.



peningkatan kapasitas, kualitas hidup, dan kesempatan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Dalam perspektif pembangunan sosial, perlindungan sosial merupakan instrumen penting untuk mengurangi kerentanan ekonomi, sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk membangun kemandirian jangka panjang. Program bantuan sosial mampu memberikan perlindungan terhadap risiko kemiskinan, tetapi pemberdayaan diperlukan agar masyarakat memiliki kemampuan mengakses sumber daya, meningkatkan keterampilan, mengembangkan usaha produktif, memperluas jejaring sosial, dan mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupannya^{11,12}. Selain itu, kemiskinan dan pengangguran juga berkaitan erat dengan proses eksklusi sosial yang menyebabkan individu kehilangan akses terhadap pekerjaan formal, pendidikan, layanan publik, dan partisipasi sosial sehingga meningkatkan tekanan psikologis serta memperlemah kohesi sosial^{13,14}. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan perlu mengintegrasikan perlindungan sosial, pengembangan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan dukungan psikososial dalam satu kerangka intervensi yang saling melengkapi.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kemiskinan, pengangguran, perlindungan sosial, maupun pemberdayaan masyarakat dari berbagai sudut pandang. Sebagian penelitian menyoroti faktor-faktor penyebab kemiskinan dan pengangguran, sementara penelitian lain menilai efektivitas program bantuan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan

¹¹Deepa Narayan, *Voices of the Poor: Can Anyone Hear Us?* (New York: Oxford University Press for the World Bank, 2000), 49–78.

¹²Marc A. Zimmerman, “Empowerment Theory: Psychological, Organizational and Community Levels of Analysis,” in *Handbook of Community Psychology*, ed. Julian Rappaport and Edward Seidman (New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000), 43–63.

¹³Ruth Levitas et al., *The Multidimensional Analysis of Social Exclusion* (London: Department for Communities and Local Government, 2007), 15–40.

¹⁴United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock—Reimagining Cooperation in a Polarized World* (New York: United Nations Development Programme, 2024), 33–61.

keluarga^{15,16}. Di sisi lain, kajian mengenai pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam mengembangkan kapasitas produktif, meningkatkan keterampilan, mengakses modal, dan membangun jejaring ekonomi^{17,18}. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih membahas isu-isu tersebut secara terpisah sehingga belum mampu menjelaskan hubungan antara kemiskinan, pengangguran, pengalaman penerima bantuan sosial, dan proses pemberdayaan dalam satu kerangka analisis yang terpadu.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*). Pertama, penelitian sebelumnya lebih banyak mengevaluasi keberhasilan bantuan sosial berdasarkan indikator konsumsi, pendidikan, dan kesehatan, sementara dampaknya terhadap pembentukan kemandirian ekonomi masyarakat masih relatif terbatas. Kedua, penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat umumnya belum mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan psikologis sebagai satu kesatuan dalam proses transformasi masyarakat miskin. Ketiga, masih terbatas penelitian yang menghubungkan perlindungan sosial dengan strategi pemberdayaan berbasis kapasitas sebagai mekanisme transisi dari ketergantungan bantuan menuju kemandirian ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang mampu menghubungkan pengalaman masyarakat miskin, pengangguran, dan penerima bantuan sosial dalam satu kerangka konseptual yang lebih komprehensif.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan model intervensi sosial terpadu yang mengintegrasikan perlindungan sosial

¹⁵Armando Barrientos, *Social Assistance in Developing Countries*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2023), 96–118.

¹⁶World Bank, *Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course* (Washington, DC: World Bank, 2022), 15–42.

¹⁷Deepa Narayan, *Voices of the Poor: Can Anyone Hear Us?* (New York: Oxford University Press for the World Bank, 2000), 49–78.

¹⁸Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Government at a Glance 2023* (Paris: OECD Publishing, 2023), 121–138.



dengan strategi pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya memandang bantuan sosial sebagai tujuan akhir kebijakan, penelitian ini menempatkan bantuan sosial sebagai *entry point* untuk memperkuat kapasitas individu dan keluarga melalui pengembangan keterampilan kerja, penguatan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal, peningkatan literasi keuangan, perluasan akses terhadap peluang kerja dan jaringan ekonomi, serta dukungan psikososial. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *cross-case analysis* untuk membandingkan pengalaman masyarakat miskin, penganggur, dan keluarga penerima bantuan sosial pada konteks perkotaan dan pedesaan sehingga mampu mengidentifikasi pola kerentanan sekaligus variasi kebutuhan intervensi berdasarkan karakteristik lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan dan pengangguran pada kelompok rentan; (2) mengidentifikasi dampak ekonomi, sosial, dan psikologis yang dialami masyarakat miskin dan penganggur; (3) menganalisis peran perlindungan sosial dalam mendukung proses pemberdayaan masyarakat; dan (4) merumuskan model intervensi sosial terpadu yang mengintegrasikan perlindungan sosial, pengembangan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, literasi keuangan, dan dukungan psikososial sebagai strategi transisi menuju kemandirian masyarakat.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian kesejahteraan sosial melalui integrasi *Capability Approach*, perlindungan sosial, eksklusi sosial, dan pemberdayaan masyarakat dalam menjelaskan hubungan antara kemiskinan dan pengangguran. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah, pendamping sosial, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam merancang kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang lebih

efektif, partisipatif, dan berkelanjutan melalui sinergi antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *Secondary Qualitative Data Analysis (SQDA)* yang dipadukan dengan *cross-case analysis* untuk menginterpretasikan kembali data kualitatif dari tiga studi lapangan yang dilaksanakan pada tahun 2025–2026 di wilayah perkotaan dan pedesaan Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kecamatan Medan Johor (Kota Medan), Kecamatan Medan Area, Desa Tembung, dan Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Data penelitian berasal dari delapan informan yang terdiri atas individu miskin, pekerja berpendapatan rendah, penganggur, keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping PKH, aparat desa, dan tokoh masyarakat yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi pengalaman mereka dengan fokus penelitian. Data yang dianalisis meliputi transkrip wawancara mendalam, catatan observasi, dokumentasi penelitian, dan laporan penelitian primer. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña¹⁹ melalui tahapan kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*), yang dilanjutkan dengan *thematic coding* dan *cross-case analysis* untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antarkasus sebagai dasar penyusunan interpretasi konseptual^{20,21}. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori dengan memanfaatkan perspektif *Capability Approach*, kemiskinan multidimensi, eksklusi sosial, dan

¹⁹Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), 31–38.

²⁰Janet Heaton, *Reworking Qualitative Data* (London: Sage Publications, 2004), 16–28.

²¹Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018), 223–248.



pemberdayaan masyarakat, sementara kerahasiaan identitas informan tetap dijaga sesuai prinsip etika penelitian kualitatif²².

C. Hasil Dan Pembahasan

Analisis dilakukan terhadap tiga studi lapangan yang dilaksanakan pada periode 2025–2026 di wilayah perkotaan dan pedesaan di Sumatera Utara. Studi-studi tersebut mengkaji pengalaman individu miskin, pengangguran, pekerja berpendapatan rendah, serta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Melalui pendekatan analisis lintas kasus (*cross-case analysis*), penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari berbagai konteks sosial yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kemiskinan, pengangguran, bantuan sosial, dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1 Karakteristik Kasus yang Dianalisis

Informan/Kasus	Lokasi	Karakteristik Informan	Isu Utama
Mistriyani	Medan Johor	Pekerja pencuci piring dengan tanggungan keluarga besar	Kemiskinan dan pendapatan rendah
Amaluddin	Medan Johor	Mantan pekerja formal usia di atas 40 tahun	Pengangguran dan hambatan usia
Suwanto Putra	Medan Area	Buruh serabutan berpenghasilan rendah	Kerentanan pekerjaan informal
Dimas Rianto Sitorus	Desa Tembung, Deli Serdang	Sarjana yang belum memperoleh pekerjaan	Pengangguran terdidik
Jumi Ase (Penerima PKH)	Desa Sena, Deli Serdang	Penerima bantuan sosial bersyarat	Ketergantungan bantuan dan keterbatasan ekonomi

²²John W. Creswell and Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018), 41–45.

Siti Suwarni (Penerima PKH)	Desa Sena, Deli Serdang	Penerima bantuan sosial bersyarat	Ketergantungan bantuan dan keterbatasan ekonomi
Pendamping PKH	Desa Sena, Deli Serdang	Pendamping program sosial	Implementasi dan pendampingan program
Aparat Desa	Desa Sena, Deli Serdang	Perangkat pemerintahan desa	Dukungan kebijakan lokal
Tokoh Masyarakat	Desa Sena, Deli Serdang	Pemuka masyarakat	Dukungan sosial komunitas

Sumber: Sintesis data penelitian lapangan, 2025–2026

Dinamika Kemiskinan sebagai Kerentanan Ekonomi Rumah Tangga

Analisis lintas kasus menunjukkan bahwa kemiskinan yang dialami informan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga dengan ketidakstabilan sumber penghidupan yang dimiliki rumah tangga. Pada kasus Mistriyani, pendapatan diperoleh dari pekerjaan mencuci piring yang bersifat harian dan sangat bergantung pada permintaan pelanggan. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Mistriyani:

"kalau tidak ada yang memanggil kerja, ya tidak ada uang yang dibawa pulang".

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kerentanan ekonomi rumah tangga muncul bukan hanya karena rendahnya pendapatan, tetapi juga karena ketidakpastian sumber nafkah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan lebih tepat dipahami sebagai kondisi kerentanan ekonomi yang membatasi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Dalam perspektif *Capability Approach*, kemiskinan terjadi ketika individu tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengakses berbagai peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya²³. Dengan demikian, keterbatasan ekonomi yang dialami informan tidak hanya berdampak pada konsumsi sehari-hari,

²³Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Oxford University Press, 1999)



tetapi juga memengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang pengembangan diri.

Pada kasus Mistriyani, beban ekonomi semakin meningkat karena harus menanggung kebutuhan empat anak dan orang tua dalam kondisi pendapatan yang sangat terbatas. Temuan serupa juga ditemukan pada keluarga penerima PKH di Desa Sena yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi biaya pendidikan dan kebutuhan rumah tangga. Situasi ini memperlihatkan bahwa kemiskinan memiliki karakter multidimensi yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan kemiskinan multidimensi²⁴.

Selain itu, pekerjaan informal menjadi strategi utama yang digunakan rumah tangga untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Namun, pekerjaan tersebut tidak memberikan kepastian pendapatan maupun kesempatan mobilitas ekonomi yang memadai. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan pekerjaan belum tentu menjamin seseorang terbebas dari kemiskinan apabila pekerjaan tersebut berada dalam sektor yang rentan dan berupah rendah.

Dinamika Pengangguran dan Eksklusi Pasar Kerja

Hasil analisis lintas kasus menunjukkan bahwa pengangguran yang dialami informan dipengaruhi oleh faktor yang berbeda-beda. Kasus Amaluddin menggambarkan hambatan memperoleh pekerjaan akibat faktor usia, sedangkan kasus Dimas Rianto Sitorus menunjukkan fenomena pengangguran terdidik yang berkaitan dengan ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki dan kebutuhan pasar kerja. Dimas menjelaskan bahwa ia telah mengirimkan berbagai lamaran pekerjaan namun belum memperoleh panggilan yang sesuai. Temuan ini menunjukkan adanya

²⁴Sabina Alkire and James Foster, "Counting and Multidimensional Poverty Measurement," *Journal of Public Economics* 95, no. 7–8 (2011): 476–487, <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>

ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dimas saat melakukan wawancara:

"banyak lowongan meminta pengalaman kerja, sementara saya belum memilikinya"

Pada kasus Amaluddin, kehilangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga serta menurunnya akses terhadap kesempatan kerja baru. Informan menghadapi kesulitan memasuki kembali pasar kerja formal karena banyak perusahaan menetapkan batas usia tertentu dalam proses rekrutmen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa eksklusi pasar kerja tidak selalu disebabkan oleh rendahnya kapasitas individu, tetapi juga dapat muncul akibat praktik rekrutmen yang membatasi kelompok usia tertentu.

Sementara itu, kasus Dimas menunjukkan bahwa pendidikan formal tidak secara otomatis menjamin keberhasilan memperoleh pekerjaan. Meskipun memiliki gelar sarjana, informan mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kurangnya pengalaman kerja, keterampilan teknis, dan jaringan profesional yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Temuan ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja yang menjadi salah satu penyebab utama pengangguran terdidik.

Analisis lintas kasus mengindikasikan bahwa pengangguran merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh faktor struktural dan individual secara bersamaan. Oleh karena itu, strategi penanganan pengangguran tidak cukup hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga perlu mencakup peningkatan keterampilan, pengembangan kompetensi, serta penguatan sistem penghubung kerja (*job matching*).



Dampak Sosial dan Psikologis Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial dan psikologis individu. Analisis lintas kasus menunjukkan bahwa sebagian informan mengalami tekanan emosional, kecemasan, dan penurunan rasa percaya diri akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga maupun harapan sosial yang ada di lingkungan mereka.

Kasus Dimas menunjukkan adanya rasa putus asa akibat kegagalan memperoleh pekerjaan meskipun telah berupaya mengirimkan berbagai lamaran kerja. Sementara itu, Amaluddin mengalami pengalaman pengucilan sosial yang memengaruhi persepsi dirinya di tengah masyarakat. Pada kasus kemiskinan kronis, informan cenderung menunjukkan sikap pasrah terhadap kondisi yang dihadapi, meskipun tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarga melalui berbagai strategi bertahan hidup.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran memiliki hubungan erat dengan meningkatnya risiko stres, kecemasan, dan menurunnya kesehatan mental^{25,26}. Oleh karena itu, intervensi sosial tidak hanya perlu berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga harus memperhatikan aspek psikososial yang memengaruhi kesejahteraan individu dan keluarga.

²⁵Karsten I. Paul and Klaus Moser, "Unemployment Impairs Mental Health: Meta-Analyses," *Journal of Vocational Behavior* 74, no. 3 (2009): 264–282, <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2009.01.001>

²⁶Matthew Ridley, Gautam Rao, Frank Schilbach, and Vikram Patel, "Poverty, Depression, and Anxiety: Causal Evidence and Mechanisms," *Science* 370, no. 6522 (2020), <https://doi.org/10.1126/science.aay0214>

Bantuan Sosial sebagai Instrumen Perlindungan Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan memberikan kontribusi penting dalam membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar, terutama pada aspek pendidikan dan kesehatan. Salah seorang penerima manfaat menyampaikan bahwa bantuan PKH sangat membantu kebutuhan sekolah anak. Temuan ini menunjukkan bahwa bantuan sosial berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang membantu keluarga mempertahankan akses terhadap pendidikan. Hal itu tertuang dalam kutipan wawancara dengan Siti Suwarni:

"uang bantuan biasanya dipakai membeli perlengkapan sekolah dan kebutuhan anak"

Hasil ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa program bantuan tunai bersyarat efektif dalam meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan dasar²⁷. Dalam perspektif perlindungan sosial, bantuan sosial berfungsi sebagai instrumen yang mampu mengurangi tekanan ekonomi jangka pendek dan menjaga keberlangsungan kesejahteraan keluarga.

Meskipun demikian, analisis lintas kasus menunjukkan bahwa bantuan sosial belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi keluarga. Sebagian besar penerima manfaat masih bergantung pada pekerjaan informal dengan tingkat pendapatan yang rendah dan tidak stabil. Dengan demikian, bantuan sosial berperan penting sebagai mekanisme perlindungan, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong mobilitas ekonomi secara berkelanjutan.

²⁷Nur Cahyadi et al., “Cumulative Impacts of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia,” *American Economic Journal: Economic Policy* 12, no. 4 (2020): 88–110, <https://doi.org/10.1257/pol.20190245>



Dari Bantuan Sosial Menuju Pemberdayaan: Sintesis Lintas Kasus

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat harus dipahami sebagai dua komponen yang saling melengkapi. Hasil analisis lintas kasus menunjukkan bahwa bantuan sosial berhasil menjaga akses keluarga terhadap kebutuhan dasar, tetapi belum mampu mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan kemiskinan dan pengangguran.

Faktor yang paling sering muncul dalam seluruh kasus adalah keterbatasan akses terhadap keterampilan, peluang kerja, informasi pasar, dan jaringan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga dari kemampuan program dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi.

Tabel 2 Sintesis Lintas Kasus Kemiskinan, Pengangguran, dan Kebutuhan Intervensi

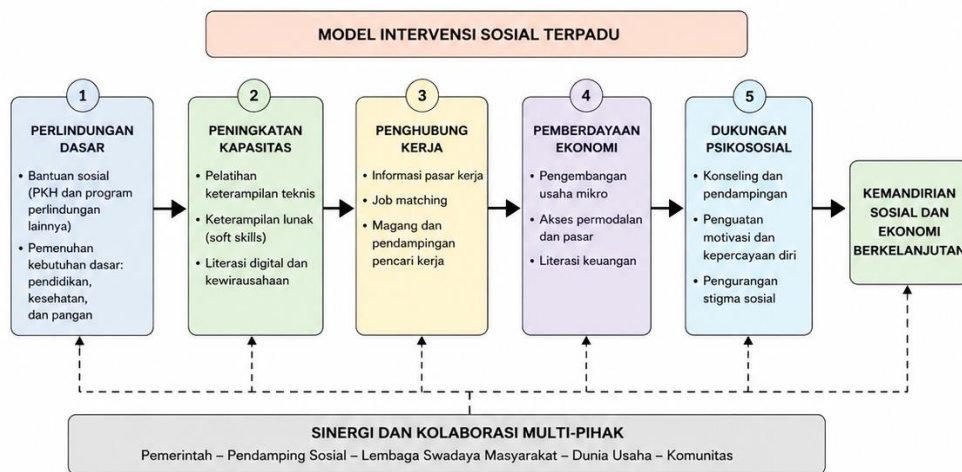
Aspek Analisis	Temuan Lintas Kasus	Dampak Utama	Implikasi Intervensi
Kemiskinan	Pendapatan rendah dan tidak stabil	Kerentanan ekonomi rumah tangga	Bantuan sosial dan penguatan usaha mikro
Pengangguran	Ketidaksesuaian keterampilan dan hambatan usia	Kesulitan memperoleh pekerjaan layak	Pelatihan kerja dan <i>job matching</i>
Pekerjaan Informal	Dominasi pekerjaan tanpa perlindungan sosial	Ketidakpastian pendapatan	Perlindungan pekerja informal
Bantuan Sosial	Membantu pendidikan dan kesehatan	Konsumsi dasar lebih terjaga	Integrasi dengan program pemberdayaan
Kondisi Psikososial	Stres, kecemasan, dan stigma sosial	Menurunnya kesejahteraan psikologis	Pendampingan psikososial

Pemberdayaan	Akses keterampilan dan peluang ekonomi masih terbatas	Kemandirian ekonomi belum terbentuk	Pengembangan kapasitas dan akses pasar
---------------------	---	-------------------------------------	--

Sumber: Hasil sintesis lintas kasus, 2025–2026.

Model Intervensi Sosial Terpadu

Berdasarkan sintesis temuan yang disajikan pada Tabel 2, penelitian ini merumuskan model intervensi sosial terpadu yang menghubungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan masyarakat. Model tersebut menjelaskan bahwa bantuan sosial berfungsi sebagai titik masuk (*entry point*) untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat rentan, yang kemudian diintegrasikan dengan peningkatan kapasitas, penghubung kerja, pemberdayaan ekonomi, dan dukungan psikososial menuju kemandirian sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Model konseptual tersebut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Model Intervensi Sosial Terpadu dalam Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran

Gambar diatas menunjukkan bahwa intervensi sosial yang efektif tidak dapat hanya mengandalkan bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan. Bantuan sosial berperan menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi perlu dihubungkan dengan strategi pemberdayaan



yang mampu meningkatkan kapasitas individu dan keluarga. Dalam model ini, peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan keterampilan, penguatan literasi digital, dan pengembangan kewirausahaan. Selanjutnya, penghubung kerja berfungsi mempertemukan pencari kerja dengan peluang kerja yang tersedia melalui mekanisme *job matching*, magang, dan pendampingan karier.

Tahap berikutnya adalah pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada pengembangan usaha mikro, akses permodalan, literasi keuangan, dan perluasan akses pasar. Pada saat yang sama, dukungan psikososial diperlukan untuk memperkuat motivasi, mengurangi stigma sosial, serta meningkatkan kepercayaan diri kelompok rentan. Seluruh komponen tersebut berjalan dalam kerangka kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, pendamping sosial, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas lokal. Melalui integrasi berbagai komponen tersebut, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah kemandirian sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

D. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan multidimensional yang saling berkaitan dan dipengaruhi oleh ketidakstabilan sumber penghidupan, dominasi pekerjaan informal, keterbatasan akses terhadap peluang kerja, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, serta berbagai hambatan sosial yang memperkuat kerentanan ekonomi rumah tangga. Hasil analisis lintas kasus menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya berperan penting dalam melindungi keluarga rentan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, namun belum cukup mendorong kemandirian ekonomi apabila tidak diintegrasikan dengan strategi pemberdayaan yang mencakup peningkatan keterampilan, *job matching*, pengembangan usaha

produktif, literasi keuangan, dan dukungan psikososial. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan **Model Intervensi Sosial Terpadu** sebagai kontribusi konseptual yang menghubungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan masyarakat dalam satu kerangka yang terintegrasi. Model ini memperkaya kajian kesejahteraan sosial dengan menegaskan bahwa efektivitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran bergantung pada sinergi antara perlindungan sosial dan penguatan kapasitas masyarakat, sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah, pendamping sosial, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam merancang kebijakan serta program pemberdayaan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7–8), 476–487.
<https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Barrientos, A. (2023). *Social assistance in developing countries* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Badan Pusat Statistik. (2025a). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2025*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2025b). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). Cumulative Impacts of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(4), 88–110.
<https://doi.org/10.1257/pol.20190245>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Heaton, J. (2004). *Reworking qualitative data*. Sage Publications.
- Levitas, R., Pantazis, C., Fahmy, E., Gordon, D., Lloyd, E., & Patsios, D. (2007). *The multidimensional analysis of social exclusion*. Department for Communities and Local Government.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Narayan, D. (2000). *Voices of the poor: Can anyone hear us?* Oxford University Press for the World Bank.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Government at a glance 2023*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/3d5c5d31-en>

- Paul, K. I., & Moser, K. (2009). Unemployment impairs mental health: Meta-analyses. *Journal of Vocational Behavior*, 74(3), 264–282.
<https://doi.org/10.1016/j.jvb.2009.01.001>
- Ridley, M., Rao, G., Schilbach, F., & Patel, V. (2020). Poverty, depression, and anxiety: Causal evidence and mechanisms. *Science*, 370(6522).
<https://doi.org/10.1126/science.aay0214>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- United Nations Development Programme. (2023). *Human development report 2023/2024: Breaking the gridlock—Reimagining cooperation in a polarized world*. UNDP. <https://hdr.undp.org>
- World Bank. (2022). *Poverty and shared prosperity 2022: Correcting course*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1893-6>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational and community levels of analysis. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of community psychology* (pp. 43–63). Springer.